



Postgraduate Bosowa University Publishing (PBUP)

Indonesian Journal of Business and Management

e-ISSN: 2460-3767 p-ISSN: 2656-6885

<https://postgraduate.universitasbosowa.ac.id/index.php/jbm>



REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN OPERASIONAL POLRES PELABUHAN MAKASSAR

Realization of the Use of Operational Budget of Subregional Police Makassar Port

Erwin Mardap^{1*}, Herminawaty Abubakar², Abdul Karim²

¹Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan

²Program Studi Manajemen Program Pascasarjana Universitas Bosowa

*Email: erwinmardap@gmail.com

Diterima: 23 April 2024/Disetujui: 08 Juni 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan anggaran operasional pada Satuan Kerja Polres Pelabuhan Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran, yang disebabkan oleh faktor internal seperti mutasi personel dan kenaikan gaji yang tidak terduga. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi anggaran secara berkala dan peningkatan komunikasi antar pihak terkait untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengelola anggaran dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi di lingkungan Polres Pelabuhan Makassar.

Kata Kunci: Efektivitas Anggaran, Penggunaan Anggaran, Polres Pelabuhan Makassar, Kesenjangan Anggaran, Akuntabilitas

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of operational budget utilization in the Makassar port subregional police unit. This study used a qualitative approach, the research collects data through interviews and direct observation in the field. In this study, the analysis techniques used were qualitative analysis and descriptive analysis. The findings reveal a gap between budget planning and realization, primarily caused by internal factors such as personnel mutations and unforeseen salary increases. The study recommends the need for regular budget revisions and improved communication among stakeholders to optimize budget utilization effectively. These findings are expected to serve as a reference for budget managers in enhancing accountability and transparency within the Makassar Port Police Station.

Keywords: Budget Effectiveness, Budget Utilization, Makassar Port Police Station, Budget Gap, Accountability



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kepolisian memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, kepolisian diharapkan tidak hanya berfungsi

sebagai lembaga penegak hukum, tetapi juga sebagai pengayom masyarakat dalam menciptakan rasa aman berkehidupan sehari-hari.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan meningkatnya kompleksitas tantangan yang dihadapi, khususnya di era digital ini, kewajiban kepolisian semakin beragam. Di satu sisi, tantangan seperti tindak kejahatan yang semakin canggih dan beragam memerlukan respon yang cepat dan tepat dari institusi kepolisian. Di sisi lain, diharapkan agar institusi ini juga menunjukkan

akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya, termasuk dalam pengelolaan anggaran. Pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sangat penting untuk mendukung seluruh operasi kepolisian, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan dan evaluasi (Hasibuan, 2007; Munandar, 2011).

Salah satu entitas yang menjalankan fungsi kepolisian tersebut adalah Polres Pelabuhan Makassar. Dengan berdirinya lembaga ini, pemerintah ingin memastikan bahwa kualitas laporan keuangan dari kementerian dan lembaga negara, termasuk kepolisian, dapat meningkat dan memenuhi standar akuntabilitas. Hal ini diatur dalam Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP/071/2012, yang memberikan pedoman tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal dalam pengelolaan keuangan. Polres Pelabuhan Makassar, sebagai bagian dari institusi kepolisian, memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan anggaran dengan baik agar semua kegiatan dapat terencana dan berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Namun, meskipun terdapat pedoman dan aturan yang mengatur, sering kali terjadi kesenjangan antara perencanaan anggaran dan realisasi anggaran di Polres Pelabuhan Makassar. Hal ini tercermin dari berbagai laporan dan observasi yang dilakukan di lapangan, di mana ditemukan sejumlah masalah yang menyebabkan terjadinya defisit anggaran, atau kondisi minus anggaran belanja. Salah satu penyebab utama dari keadaan ini adalah variabel internal yang berhubungan dengan dinamika sumber daya manusia, seperti mutasi jabatan dan kenaikan pangkat yang tidak terduga, serta kenaikan gaji yang bersifat mendadak. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya melibatkan angka semata, namun juga meliputi penyesuaian-penyesuaian yang perlu dilakukan secara terus-menerus (Prasetyo, 2010).

Dalam kajian ini, penting untuk menggali lebih dalam alasan di balik kesenjangan anggaran yang terjadi, serta langkah-langkah pencegahan yang dapat diambil untuk menghindari masalah serupa di masa depan. Menurut Aiptu Darwin dari Polres Pelabuhan Makassar, kesenjangan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya mutasi personel dan ketidakpastian dalam proyeksi tunjangan dan gaji. Ini sebagaimana diungkapkan oleh Mahsun (2010) yang menyatakan bahwa penganggaran adalah suatu rencana yang sistematis yang mencakup semua kegiatan organisasi dan dinyatakan dalam unit moneter, untuk periode tertentu di masa depan. Dengan memahami faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan anggaran, diharapkan solusi yang lebih efektif dapat diambil untuk meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran di Polres Pelabuhan Makassar.

Dalam dunia pendidikan manajemen keuangan, sangat penting bagi pengelola anggaran, termasuk di Polres Pelabuhan Makassar, untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip anggaran. Seperti yang ditekankan oleh Nafarin (2013), anggaran tidak hanya sebagai perencanaan finansial tetapi juga sebagai alat pengukur kinerja organisasi. Sebagai lembaga publik, Polres Pelabuhan Makassar memiliki tanggung jawab

untuk memastikan bahwa penggunaan anggarannya dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi harapan masyarakat. Ini termasuk menghindari adanya slack anggaran, yaitu praktik dimana pihak terkait merencanakan anggaran yang lebih kecil dari yang seharusnya dicapai untuk mempermudah pencapaian target (Suartana, 2020).

Kepolisian tidak hanya berfungsi menjalankan tugas policing, tetapi juga perlu memperhatikan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tindakan yang diambil. Dalam hal ini, laporan realisasi anggaran menjadi alat yang sangat penting. Menurut Dodd dan Chen (1996), laporan keuangan harus mencerminkan kondisi dan kinerja nyata dari suatu instansi, termasuk dalam hal realisasi anggaran. Ini menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Polres Pelabuhan Makassar untuk melaporkan dan mengevaluasi penggunaan anggarannya secara berkala agar dapat mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan anggaran operasional pada Satuan Kerja Polres Pelabuhan Makassar.

2. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris, yang berfokus pada pengumpulan data dari kondisi nyata di lapangan melalui interaksi langsung dengan informan serta pengamatan situasi yang relevan. Fokus utama penelitian adalah pada penerapan dan realisasi anggaran yang dilaksanakan di Polres Pelabuhan Makassar, di mana peneliti akan mengeksplorasi masalah yang terkait dengan pengelolaan anggaran di institusi kepolisian.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Polres Pelabuhan Makassar yang terletak di Jalan Ujung Pandang No. 12, Kota Makassar. Pemilihan lokasi dilakukan karena Polres Pelabuhan Makassar merupakan representasi penerapan kebijakan serta realisasi anggaran dalam lingkup operasional kepolisian. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2023, dengan mempertimbangkan pentingnya konteks terbaru mengenai pengelolaan anggaran di unit tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori: data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer: Data primer diambil melalui instrumen pengamatan dan wawancara langsung. Data ini diperoleh dari staf di bidang keuangan, anggota perencanaan, serta personel Satuan Kerja yang terlibat dalam kegiatan keuangan di Polres Pelabuhan Makassar. Menurut Sugiyono (2015), sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Melalui wawancara ini, peneliti berupaya menggali informasi, pandangan, dan pengalaman para informan mengenai pengelolaan anggaran.
- 2) Data Sekunder: Data sekunder digunakan untuk mendukung data primer dan diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi. Data sekunder ini mencakup buku, artikel, majalah, arsip tertulis, dan dokumen lain yang relevan dengan objek

penelitian. Sumber sekunder tidak langsung memberikan data kepada peneliti, melainkan melalui orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2015). Di antara sumber sekunder, informasi juga akan dikumpulkan dari para pejabat terkait di Polres, termasuk Kabagren Polres Pelabuhan Makassar Kompol Yusuf Balik, Aiptu Darwin, Aipda Irwan Genda, Bripta Danial, dan Bripta Muh. Sadhar.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

- 1) Wawancara: Wawancara merupakan teknik tanya jawab yang diarahkan untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Banister (1994) dalam Poerwandari (2013), wawancara kualitatif dilakukan untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu terkait dengan topik yang diteliti. Peneliti akan menggunakan wawancara semi-terstruktur, yang memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangan dan pengalaman mereka.
- 2) Observasi: Observasi atau pengamatan didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian atau fenomena. Emzir (2016) menyatakan bahwa observasi ilmiah bertujuan untuk mengungkapkan faktor-faktor penyebab serta menemukan kaidah yang mengatur. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi partisipan, di mana peneliti terlibat langsung dalam kehidupan sehari-hari di Polres Pelabuhan Makassar untuk memahami lebih baik konteks dan kondisi di lapangan.
- 3) Dokumentasi: Dokumen merupakan sumber informasi yang penting bagi peneliti. Yaumi (2014) menjelaskan bahwa dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental. Dalam penelitian ini, dokumen yang dikumpulkan dapat mencakup catatan harian, laporan keuangan, peraturan, dan kebijakan. Dokumen ini akan digunakan sebagai data penguat atau pendukung hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya.

Analisis data merupakan proses sistematis dalam mencari dan menyusun data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian ini, teknik analisis yang digunakan meliputi:

- 1) Analisis Kualitatif: Moleong (2017) menyatakan bahwa analisis kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan. Penelitian ini akan mengorganisasi data dalam kategori dan menjabarkan informasi untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti.
- 2) Analisis Deskriptif: Analisis deskriptif akan digunakan untuk mendeskripsikan kegiatan operasional yang terkait dengan proses realisasi anggaran di Satuan Kerja Polres Pelabuhan Makassar. Peneliti akan menganalisis dan

merancang sistem yang tepat untuk diterapkan, serta memberikan rekomendasi mengenai pengelolaan laporan keuangan yang lebih baik. Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan (Field research), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan penelitian. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini yang menekankan pada penerapan realisasi anggaran yang dilaksanakan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Analisis Perbandingan Anggaran dan Realisasi Anggaran di Polres Pelabuhan Makassar Tahun 2024

Analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran di Polres Pelabuhan Makassar merupakan perencanaan keuangan yang bersumber dari pendapatan negara dan hibah, yang mencakup penerimaan dari pajak dan bukan pajak. Anggaran ini disusun setiap tahun dan digunakan untuk mendukung operasional unit kepolisian. Dalam penelitian ini, data yang digunakan untuk membandingkan anggaran dan realisasi anggaran diambil untuk tahun 2024. Realisasi anggaran sendiri merupakan penerapan dari anggaran yang telah direncanakan sebelumnya. Aiptu Darwin, Paur Subbag Dalprogar Bag Ren Polres Pelabuhan Makassar, menjelaskan bahwa setiap tahunnya terjadi kesenjangan dalam belanja pegawai. Hal ini terutama disebabkan oleh mutasi jabatan dan kenaikan pangkat anggota yang tidak menentu. Proses mutasi dan kenaikan pangkat ini tidak dapat diprediksi, sehingga pembayaran gaji dan tunjangan disesuaikan dengan jabatan dan pangkat terbaru. Ini dapat menyebabkan adanya kesenjangan anggaran di Polres Pelabuhan Makassar.

Berdasarkan penjelasan Aipda Irwan Genda, Paur Renprogar Bag Ren, kesenjangan anggaran juga terjadi akibat adanya kenaikan gaji dan tunjangan yang disesuaikan dengan kondisi riil serta ketetapan baru yang mengakibatkan peningkatan jumlah gaji dan tunjangan yang diterima. Kenaikan pangkat yang signifikan di tahun 2024 juga menjadi kontribusi dalam mengakibatkan kesenjangan anggaran belanja pegawai, karena anggota yang mengalami kenaikan pangkat langsung akan menerima gaji dan tunjangan baru yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

b. Kesenjangan Antara Realisasi dan Anggaran

Kesenjangan antara anggaran dan realisasi sering kali terjadi di berbagai organisasi, termasuk di lingkungan kepolisian. Menurut Suartana (2020:138), banyak perusahaan menggunakan anggaran sebagai satu-satunya pengukur kinerja manajemen. Penekanan yang berlebihan pada target anggaran dapat menyebabkan munculnya slack, yaitu praktik di mana individu dalam organisasi tidak mencapai target yang sebenarnya dapat dicapai untuk dapat memenuhi ekspektasi manajemen. Slack anggaran merupakan perbedaan antara anggaran yang dinyatakan

dan estimasi anggaran yang dapat diprediksi secara jujur. Hal ini mengarah pada penyusunan anggaran yang mudah dicapai, namun tidak mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya.

Dalam konteks ini, kesenjangan anggaran di Polres Pelabuhan Makassar dapat dipicu oleh informasi atau komunikasi yang tidak sinkron di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan. Misalnya, informasi yang bersumber dari bawahan mungkin berbeda dengan informasi yang diterima atasan, yang pada gilirannya dapat menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat. Diskrepansi semacam ini sering kali membuat proses perencanaan anggaran menjadi kurang efektif dan berujung pada pengeluaran yang tidak terencana.

c. Faktor Penyebab Kesenjangan Anggaran

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan antara anggaran dan realisasi. Salah satunya adalah perilaku oportunistik yang terjadi dalam Organisasi Perangkat Daerah. Pelaku-pelaku oportunistik ini sering kali mengusulkan kegiatan yang tidak menjadi prioritas, mengejar keuntungan pribadi melalui pengusulan kegiatan yang memiliki potensi keuntungan besar, dan memperbesar anggaran untuk kegiatan yang hasilnya sulit untuk diukur. Besarnya anggaran pada pos belanja dapat memperburuk kondisi ini, karena ketidakjelasan dalam hasil kegiatan dapat menjadi pemicu munculnya kesenjangan anggaran.

Lebih lanjut, kesenjangan anggaran dapat juga disebabkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif antara para pengelola anggaran. Minimnya sinkronisasi informasi di antara para pengambil keputusan dapat menciptakan kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Kondisi ini mencerminkan pentingnya membangun saluran komunikasi yang baik agar semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dapat bersinergi dan mendukung tujuan bersama dalam mencapai efektivitas penggunaan anggaran. Dengan memahami serta mengatasi faktor-faktor penyebab kesenjangan ini, diharapkan upaya perbaikan dalam pengelolaan anggaran di Polres Pelabuhan Makassar dapat terwujud.

d. Kesenjangan Anggaran dan Realisasi Belanja pada Satuan Kerja Polres Pelabuhan Makassar

Kesenjangan anggaran di Satuan Kerja Polres Pelabuhan Makassar menjadi isu penting dalam pengelolaan keuangan institusi. Salah satu faktor utama penyebab terjadinya kesenjangan ini adalah realisasi belanja pegawai, di mana terjadi perbedaan antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan. Menurut Kabagren Polres Pelabuhan Makassar, beberapa faktor yang menyumbang terjadinya kesenjangan belanja pegawai terdiri atas: (a) mutasi personel yang sering terjadi; (b) kenaikan pangkat bagi anggota kepolisian yang tidak dapat diprediksi; (c) kenaikan gaji berkala; (d) adanya perubahan tanggungan akibat penambahan atau pengurangan jumlah sumber daya manusia yang terlibat; serta (e) faktor personal, seperti pernikahan atau bahkan meninggalnya anggota personel.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterlambatan dalam penyerapan anggaran, di antaranya proses perencanaan anggaran yang kurang matang, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana, hingga kendala dalam pengadaan barang dan jasa. Selain itu, faktor-faktor internal dari pengguna anggaran juga bertindak sebagai penghambat. Untuk mengatasi masalah ini, perbaikan kelembagaan, peningkatan proses bisnis, serta pengelolaan sumber daya manusia menjadi langkah strategis yang harus diambil. Juga, perbaikan dalam sistem penghasilan dan remunerasi akan berfungsi untuk meningkatkan kinerja pelayanan, khususnya yang berkaitan dengan seluruh proses penyerapan anggaran.

Jumlah personel Polres Pelabuhan Makassar yang mengalami perubahan, baik pengurangan maupun penambahan, setiap tahunnya bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh mutasi yang terjadi di lingkungan kepolisian. Akibat dari fenomena ini, terjadi lonjakan pengeluaran pada belanja pegawai. Oleh karena itu, saat penyusunan anggaran, angka belanja pegawai dihitung berdasarkan jumlah personel yang ada pada saat itu. Sementara itu, dalam waktu berjalan, jika terdapat penambahan personel atau kenaikan pangkat, hal ini dapat menyebabkan pagu anggaran belanja pegawai menjadi tidak mencukupi.

Menurut Aiptu Darwin, staf personel Satuan Kerja Polres Pelabuhan Makassar, masalah pagu kesenjangan ini terutama disebabkan oleh penggunaan data riil personal yang tidak sejalan dengan kenyataan lapangan. Mutasi yang konstan dan kebijakan baru yang diberlakukan terkait tunjangan dan gaji juga berkontribusi terhadap peningkatan beban anggaran. Dalam pernyataan serupa, Aipda Irwan Genda, Paur Bagren, mencatat bahwa adanya kenaikan gaji dan tunjangan yang tidak sejalan dengan prediksi awal menyebabkan realisasi kebutuhan anggaran menjadi lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Pada tahun 2024, kenaikan pangkat yang signifikan diantara personel menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan ini, di mana mereka menerima gaji dan tunjangan baru sesuai dengan pangkat lebih tinggi yang tentu dapat memberikan dampak pada anggaran yang telah disusun sebelumnya.

Dalam rangka mengelola dan mengaudit keuangan, penting bagi Polres Pelabuhan Makassar untuk menerapkan sistem akuntansi keuangan yang baik. Kopol Yusuf Balik, Kabagren Polres Pelabuhan Makassar, menekankan bahwa pengelolaan keuangan diawali dengan penginputan data dan dokumen dari tiap satuan kerja yang kemudian akan diproses untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

e. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Kesenjangan Realisasi Anggaran

Upaya dalam penanggulangan kesenjangan dan pencegahannya sangat penting untuk dilakukan agar pengelolaan anggaran dapat berjalan lebih efektif. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pelaksanaan revisi anggaran. Revisi anggaran merupakan langkah untuk

mengubah rincian anggaran yang telah ditetapkan, berdasarkan evaluasi dari pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan berbagai responden, termasuk Kabagren Polres, Aiptu Darwin, dan Aipda Irwan Genda, disimpulkan bahwa pengajuan revisi Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) menjadi langkah yang paling rekomendatif untuk mengatasi kesenjangan pagu.

Selain itu, dampak dari kesenjangan realisasi anggaran perlu diperhatikan. Menurut Kabagren dan Aiptu Darwin, dampak yang timbul dapat berupa penurunan output teknis dan non-teknis. Namun, tidak semua responden sepatutnya mengenai dampak ini; Aipda Irwan Genda mengemukakan bahwa tidak ada dampak yang signifikan dari kesenjangan yang terjadi. Untuk mengurangi efek negatif tersebut, penerapan metode self blocking saat perencanaan anggaran penting dilakukan. Dengan pengaturan self blocking pada tahap awal, akan meminimalkan kemungkinan kesenjangan yang terjadi.

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, revisi anggaran dilakukan dalam beberapa kategori. Pertama, revisi dilakukan jika ada perubahan pada pagu anggaran yang memicu perubahan rincian, seperti penambahan atau pengurangan belanja. Kedua, bila pagu anggaran tetap tetapi ada perubahan rinci pada belanja yang dianggarkan, revisi juga diperlukan. Ketiga, revisi administrasi dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dalam rumusan anggaran yang tidak berdampak signifikan pada pengeluaran.

Langkah penting juga adalah untuk melakukan terus-menerus evaluasi dan pengawasan terhadap penggunaan anggaran, melakukan pembayaran terhadap anggaran yang terlanjur terserap, dan memberikan laporan kepada pihak perencanaan di tingkat Polda Sulsel sesuai prosedural yang ada.

f. Alur Pelaksanaan Laporan Realisasi Anggaran di Satuan Kerja Polres Pelabuhan Makassar

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan instrumen awal untuk mengevaluasi penyerapan anggaran di Satuan Kerja Polres Pelabuhan Makassar. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, peran Kepolisian dalam menjaga keamanan nasional adalah sebuah amanah yang harus dikelola dengan baik, di mana anggaran merupakan bagian penting untuk melaksanakan fungsi tersebut. Reformasi dalam pengelolaan keuangan negara yang diatur melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juga menargetkan pembaruan dalam sistem pengelolaan keuangan, termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja yang memungkinkan evaluasi dari segi hasil dan efektivitas penggunaan anggaran.

Pelaksanaan anggaran yang baik memerlukan pengaturan yang sesuai dengan rencana kegiatan dan Rencana Penarikan Dana (RDP). Dengan cara ini, penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Pemerintah menerapkan penghargaan dan sanksi bagi kementerian/lembaga berdasarkan persentase penyerapan anggaran, sehingga tujuan pengelolaan anggaran tidak hanya terfokus pada

laporan finansial semata, tetapi juga pada pencapaian kinerja publik yang terbaik.

Aiptu Darwin menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan LRA di Satuan Kerja Polres Pelabuhan Makassar, semua dokumen keuangan, termasuk Surat Perintah Pembayaran (SPM) dan Surat Perintah Penarikan Dana (SP2D), akan dihimpun, dan data tersebut akan diinput pada aplikasi sistem manajemen anggaran. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan laporan yang akurat, transparan, dan akuntabel.

Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas keuangan. Hal ini mencakup semua prosedur dan tata cara dalam menyusun laporan realisasi anggaran. Dengan penyusunan LRA yang sistematis, Polres Pelabuhan Makassar diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, menjaga kepercayaan publik, dan turut serta dalam mewujudkan good governance.

Berdasarkan kajian ini, Laporan Realisasi Anggaran Polres Pelabuhan Makassar akan menjadi sarana untuk mengukur capaian kinerja personel, dan sebagai alat untuk mendorong hasil yang lebih baik dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh instansi kepolisian. Penekanan pada akuntabilitas, transparansi, dan evaluasi berfungsi sebagai fondasi pengelolaan keuangan yang baik dalam mendukung tugas kepolisian sebagai aparat penegak hukum, pelindung, dan pelayanan masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian antara anggaran yang direncanakan dan realisasi belanja pegawai. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah mutasi personil, kenaikan pangkat yang tidak terduga, dan kenaikan gaji berkala. Kejadian ini mengakibatkan pengeluaran aktual sering kali melebihi estimasi yang telah ditentukan, sehingga menciptakan tantangan dalam pengelolaan anggaran. Kesenjangan anggaran ini, jika tidak ditangani dengan baik, dapat berdampak signifikan pada efisiensi pengelolaan keuangan dan menurunkan output operasional. Penelitian juga menunjukkan bahwa upaya penanggulangan, seperti revisi anggaran dan adaptasi dalam perencanaan sumber daya manusia, sangat diperlukan untuk memperbaiki kondisi ini. Oleh karena itu, penerapan sistem akuntansi keuangan yang baik serta evaluasi berkala terhadap laporan realisasi anggaran menjadi sangat krusial dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di Polres Pelabuhan Makassar. Pengelolaan anggaran yang efektif dan berkelanjutan akan berkontribusi positif terhadap peningkatan kinerja Polres Pelabuhan Makassar dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi yang melindungi dan melayani masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A. (1999). Studi Agama: Normativitas atau Historisitas (cet. 2). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Bahm, A. (1980). *What is Science*. Albuquerque, New Mexico: World Books.
- Daoed, J. (1986). Pancasila, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan: Pidato Kunci pada Seminar Nasional: "Pancasila sebagai Orientasi Pengembangan Ilmu". Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM.
- Djohar, P. (2007). *Materi Perkuliahan Filsafat Ilmu*. Yogyakarta: PPS UNY.
- Fajar, N., & Arfan, M. (2017). Analisis Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 10(2), 95-102.
- Fajar, N., & Abdul, R. (2013). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1-14.
- Hardiman, (2003). *Melampaui Positivisme dan Modernitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Iswahyudin. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. *Jurnal Katalogis*, 4(6), 152-168.
- Koento Wibisono. (1985). *Ilmu Filsafat dan Aktualitasnya dalam Pembangunan Nasional: Suatu Tinjauan dari Sudut Tradisi Pemikiran Barat*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Koento Wibisono. (1996). *Arti Perkembangan Menurut Positivisme August Comte (cet. 2)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Magnis, S. (1992). *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Malayu S.P. Hasibuan. (2007). *Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Malayu S.P. Hasibuan. (2012). *Manajemen SDM: Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Miliasih, R. (2012). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga TA 2010 di Wilayah Pembayaran KPPN Pekanbaru*. Tesis, Universitas Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (37 ed.). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Noeng, M. (2003). *Filsafat Islam Telaah Fungsional: Suplemen Filsafat Ilmu Edisi II*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Poespoprojo, (1986). "Aktualitas Filsafat Ilmu ke Arah Kemasakan Praktek dan Pengelolaan Ilmu". Dalam Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Sinaga, M. T. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Senjangan Anggaran dengan Locus of Control dan Budaya Organisasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 1-14.
- T. Jacob. (1988). *Manusia, Ilmu dan Teknologi: Pergumulan Abadi dalam Perang dan Damai*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Van Peursen, P. (1976). *Strategi Kebudayaan* (terj. Dick Hartoko). Yogyakarta: Kanisius & BPK Gunung Mulia.
- Wati, K. D., et al. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Program S1*, 2, 1-14.
- Winter, J. S. (2019). Pengaruh Realisasi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal Terhadap Penetapan Pagu Indikatif di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Banggai. *Jurnal Katalogis*, 5(2), 36-48.
- Zarinah, M., Darwanis, D., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas SDM terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran SKPD Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 90-97.